

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS MADRASAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH MA'ARIF NU KENCONG JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Kependidikan Islam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Oleh:

IFTITAHUS SHOLEHA
NIM. 084133075

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
SEPTEMBER 2017**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS MADRASAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH MA'ARIF NU KENCONG JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Kependidikan Islam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

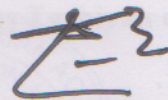
Oleh:

IFTITAHUS SHOLEHA

NIM. 084133075

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER



Drs. SARWAN, M.Pd
NIP. 19631231 1993303 1 028

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERBASIS MADRASAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH MA'ARIF NU KENCONG JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Kependidikan Islam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2017

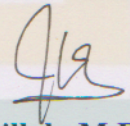
Tim Penguji

Ketua



Rif'an Humaidi, M.Pd.I
NIP. 19790531 200604 1016

Sekretaris



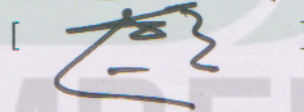
Mahillah, M.Fil.I
NIP. 19821022 201503 2003

Anggota:

1. Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag



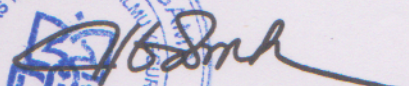
2. Drs. Sarwan, M.Pd



Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan




Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.HI
NIP. 19760203 200212 1 003

ABSTRAK

Iftitahus Sholeha, 2017: Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di era modern ini tentu memerlukan manajemen pembiayaan yang baik. Hal ini guna untuk memfasilitasi memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Di dalam sebuah lembaga tidak lepas dari munculnya permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya kekurangan dana untuk pembangunan dan pengembangan sekolah/madrasah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya manajemen pembiayaan berbasis madrasah. Dalam hal ini berarti madrasah mempunyai wewenang untuk mengelola keuangannya sendiri. Karena mereka yang mengetahui segala permasalahan yang terjadi dan cara mengatasinya.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember? 3) Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember

Metode penelitian diawali dari pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian: 1) Perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan menganalisis kebutuhan dengan membuat skala prioritas yang nantinya akan dituangkan dalam penyusunan RAPBS dan kemudian dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 2) Pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu merealisasikan hasil perencanaan yang berisi kegiatan kebhendaharaan diantaranya penyaluran biaya, pembukuan anggaran dan penyusunan laporan. 3) Evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu berupa pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah, serta yayasan. Kaitannya dalam hal ini yaitu berupa Laporan Pertanggung Jawaban.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45

E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahapPenelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sangat bervariasinya kondisi daerah beserta masalah-masalah yang dihadapi telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi daerah dan kendalanya dalam perencanaan. Standardisasi dan penyeragaman rencana yang terlalu terpusat dirasakan menghambat pelaksanaan pembangunan karena cenderung akan berakibat pada ketidaksesuaian antara rencana pusat dan kebutuhan daerah masing-masing.²

Saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa problem yang menonjol (1) rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan (2) rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan (3) bertambahnya anak keluarga miskin yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar, dan 4) rendahnya manajemen pendidikan karena belum terwujud kemandirian dan keunggulan ilmu

² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), iii

pengetahuan dan teknologi dikalangan akademis yang mengakibatkan kelambatan sistem pendidikan.

Melihat beberapa problem pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional perlu penanganan serius, sehingga memerlukan paradigma baru. Bahkan hal ini juga disebutkan secara deskriptif pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “pengelolaan satuan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah”.³ Dalam konsep Islam dapat ditegaskan bahwa semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka bertambah pula hak dan kewajiban terhadap pendidikan. Karena itu keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisaa’:9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisaa’: 9).⁴

E. Mulyasa berpendapat bahwa masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah. Karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak

³ Undang-Undang SISDIKNAS (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 33□

⁴ Al-Qur’an, 4:9.

seungguhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama kaitannya dengan sarana dan prasarana yang tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal, hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung pengelolaannya kepada madrasah. Dalam hal ini kepala madrasah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan madrasah. Masalah keuangan sekolah dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan politik yang sedang berkembang dimasyarakat. Demikian halnya masalah evaluasi keuangan sekolah tidak terlepas dari masalah politik. Agar keuangan madrasah dapat menunjang kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan madrasah tersebut. Untuk menjadi kepala madrasah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan madrasah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban. Disamping itu kepala madrasah juga harus memahami konteks politik dan ekonomi serta implikasinya terhadap keuangan madrasah.

Penerapan manajemen berbasis madrasah di Indonesia selain juga diposisikan sebagai alternatif juga sebagai kritik atas penyelenggaraan pendidikan yang selama ini tersentralisasi, karena pendidikan sentralisasi tidak mendidik manajemen lembaga pendidikan madrasah untuk belajar mandiri, baik dalam hal manajemen kepemimpinan maupun dalam pembangunan institusional, pengembangan kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, dan terutama membangun partisipasi masyarakat untuk memiliki madrasah. Sedangkan peningkatan pengaruh lembaga perlu dukungan para stakeholder yang meliputi pemerintah daerah, komite sekolah (kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat).⁵

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanatkan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 8 dan pasal 9 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.⁶

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan timbulnya perhatian yang besar pada keuangan, yaitu pertama, keuangan termasuk kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaharuan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan

⁵ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 20

⁶ Undang-Undang SISDIKNAS, 9

yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.

Sebagaimana diamanatkan dalam PP RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa “(1)pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan”.⁷

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Ketentuan ini menjadi ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja, realitanya baru mulai proses paling awal lembaga pendidikan swasta. Terlebih

⁷ Ibid, 77

lagi, lembaga lembaga pendidikan swasta telah menjadi korban diskriminasi kebijakan pemerintah.⁸

Keterkaitan dengan pernyataan di atas, sesuai informasi yang peneliti dapatkan bahwa manajemen pembiayaan di MA Ma'arif NU Kencong dikelola secara transparan yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, evaluasi serta pertanggungjawaban. Dana yang didapat yaitu dari pemerintah dan orang tua siswa. Dana tersebut dialokasikan diantaranya untuk honor guru, UKK, sarpras, membantu siswa miskin yang mempunyai SKTM, dana sosial. Madrasah juga mendanai perlombaan yang diikuti siswa untuk kemajuan madrasah.⁹

Adapun hasil dari perlombaan yang diikuti yaitu berupa prestasi yang telah diraih seperti lomba hadrah, pramuka, volly, gerak jalan, qiro'ah, MIPA. Perlombaan yang diikuti siswa ini mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi. Namun dalam mengikuti perlombaan yang ada, madrasah sering tidak membuahkan hasil. Tetapi dalam hal ini MA Ma'arif NU Kencong sangat semangat untuk membiayai siswanya dalam mengikuti perlombaan atau olimpiade tersebut. Prestasi itu tidak akan diraih jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang dan juga guru yang melatih. Oleh sebab itu maka pembiayaanlah yang berperan untuk mewujudkan prestasi tersebut.¹⁰

⁸ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 163

⁹ Suwoto, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

¹⁰ Sodikun, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

Melihat prestasi yang telah diraih dan manajemen yang dilakukan madrasah, maka sekolah tersebut mau dijadikan MAN 4 Jember oleh pemerintah tetapi ketua yayasan tidak menyetujui karena madrasah ini milik yayasan dibawah naungan pondok pesantren Assunniyyah karena jika di negerikan nanti akan menjadi milik pemerintah.¹¹

Mengingat hal tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kemampuan madrasah dalam manajemen pembiayaan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul: “manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma’arif NU kencong jember tahun pelajaran 2017/2018”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicarikan jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, spesifik, operasional, yang ditayangkan dalam bentuk kalimat tanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma’arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018?

¹¹ Suwoto, wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018?
3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengaju pada konsisten dalam masalah-masalah yang telah akan dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹²

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya mengenai “*Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma’arif NU Kencong*”, Sehingga dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Serta memberikan wawasan khusus manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah lembaga.

- b. Bagi lembaga yang menjadi obyek penelitian

¹²Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi perkembangan lembaga.

c. Bagi masyarakat

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk mendaftarkan anaknya ke MA Ma'arif NU Kencong.

d. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini sebagai tambahan literatur atau referensi bagi pihak IAIN atau mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹³

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

¹³ Ibid, 45.

Manajemen pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pengelolaan seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah, orang tua siswa ataupun masyarakat.

2. Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum.¹⁴

Mutu atau kualitas adalah ukuran baik atau buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat (kecerdasan, kepandaian dan sebagainya).¹⁵ Menurut Umiarso dan Imam Gojali mendefinisikan mutu adalah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa.¹⁶

Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah cara untuk menentukan baik buruk suatu produk atau hasil kerja sesuai standar atau belum.

Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada siswa yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini, terdapat sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga

¹⁴ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 56.

¹⁵ Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: ALFABETA, 2012), 231

¹⁶ Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: iRCiSod, 2010), 124

bab penutup.¹⁷ Untuk mempermudah dalam pemahaman ini maka peneliti di sini menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan, pemahaman dalam pembahasan ini, adapun sistematika adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori tentang manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bab III, merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, merupakan bab yang membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyektif penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

Bab V, merupakan bab tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Fungsi bab ini adalah memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian, sedangkan saran-saran dapat membantu memberikan saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian.

¹⁷ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, 48.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti tidak mengesampingkan hasil dari penelitian yang lebih dahulu dilakukan. Ini dilakukan dalam rangka dalam rangka menguji keterkaitan dan orisinilitas penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu sangat perlu memunculkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Rohimah, dengan judul implementasi manajemen keuangan sekolah di SMPI. Nurul Hikmah Besuki Situbondo tahun pelajaran 2014/2015

Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen pembiayaan di SMP. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan, lokasi penelitian dilembaga formal, subjek penelitian menggunakan purposive sampling, metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu teknik analisis data menggunakan reduksi data sedangkan pada penelitian ini analisis kualitatif deskriptif. Implementasi manajemen pembiayaan sudah berjalan akan tetapi belum tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi manajemen pembiayaan sudah berjalan akan tetapi masih belum tercapai secara maksimal.¹⁸

2. Faizal Fahmi, studi tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Ash-Sholihin Mumbulsari tahun pelajaran 2015/2016.

Penelitian ini membahas tentang manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Ash-Sholihin Mumbulsari. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama membahas tentang manajemen pembiayaan, metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi, teknik analisis menggunakan kualitatif deskriptif. sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan sekarang adalah terletak pada fokus dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 tata usaha dan dua orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.¹⁹

3. Raudhotul Munawaroh, manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Ranuyoso Lumajang tahun pelajaran 2014/2015

Penelitian ini membahas tentang kebijakan dan implementasi manajemen keuangan. Persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode

¹⁸Skripsi Rohimah, STAIN Jember 2014

¹⁹ Skripsi Faizal Fahmi, IAIN Jember 2015

deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu dalam penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah pendidikan dasar sedangkan penelitian ini menggunakan objek pendidikan menengah.

Hasil penelitian ini menghasilkan manajemen pembiayaan sudah berjalan akan tetapi masih belum tercapai secara maksimal.²⁰

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rohimah, dengan judul implementasi manajemen keuangan sekolah di SMPI. Nurul Hikmah Besuki Situbondo tahun pelajaran 2014/2015	Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan akan tetapi belum tercapai secara maksimal.	sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan, lokasi penelitian dilembaga formal, subjek penelitian menggunakan purposive sampling, metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.	penelitian terdahulu teknik analisis data menggunakan reduksi data sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
2	Faizal Fahmi, studi tentang pelaksanaan	implementasi manajemen	sama-sama meneliti	Penelitian terdahulu

²⁰Skripsi Raudhotul Munawaroh , 2014

	manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Ash-Sholihin Mumbulsari tahun pelajaran 2015/2016.	pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 tata usaha dan dua orang guru melalui pertanyaan yang diajukan	tentang manajemen pembiayaan, metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi, teknik analisis menggunakan kualitatif deskriptif,.	membahas tentang mekanisme pelaksanaan dana BOS sedangkan penelitian ini membahas tentang peningkatan mutu pendidikan
3	Raudhatul Munawaroh, manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Ranuyoso Lumajang tahun pelajaran 2014/2015	manajemen pembiayaan sudah berjalan akan tetapi masih belum tercapai secara maksimal	sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan, metode yang deskriptif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen

keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah/madrasah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS/MBM, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini.²¹

Tujuan manajemen pembiayaan adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlangsung. Manajemen keuangan memiliki aturan tersendiri, terdapat pemisahan tugas dan fungsi antara otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan otorisator. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan

²¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 47

penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Dalam kajian manajemen pastinya tidak akan luput dari tiga substansi manajemen antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa didalam perencanaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Perencanaan sebagai proses, artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak.

Perencanaan sebagai kegiatan rasional, artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang riil dan analisis yang logis, yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan ramalan yang intuitif. Perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis, berarti

perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Kegiatan yang satu menjadi landasan tahapan berikutnya. Tahapan kegiatan tersebut dapat dijadikan panduan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diatasi. Sedangkan tujuan perencanaan itu sendiri arahnya agar kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan didalam perencanaan keuangan sekolah antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan yang mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dari berbagai kegiatan.

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan sekolah. Perencanaan pembiayaan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan madrasah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan pembiayaan sekolah. Adapun perencanaan anggaran dapat dibedakan menjadi dua yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan anggaran.

1) Penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran seringkali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana, namun dalam pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni RAPEN (rencana anggaran dan pendapatan belanja negara) dan RABES (rencana anggaran dan belanja sekolah). Dalam dua istilah tersebut “anggaran” bukan suatu rencana, istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran”.

Setiap organisasi tentu memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Oleh karena itu anggaran ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari atasan yang berwenang.

Kegiatan kedua dari manajemen keuangan atau pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang.²²

Dalam kaitannya proses penyusunan anggaran ini, Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan anatar lain:

²² Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 317-318

Perencanaan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran.²³

Sebagaimana hal tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Perencanaan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-yang telah tersedia.
- c) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian

²³ Mulyasa, *menjadi kepala sekolah profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 199

sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Kepala sekolah/madrasah diharuskan mampu menyusun rencana anggaran dana pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dan tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, dana penunjang pendidikan (DPD), subsidi bantuan penyelenggara pendidikan (SBPP), bantuan operasional dan perawat (BOP), bantuan operasional sekolah (BOS), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain.

Untuk sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan dan masyarakat.²⁴

Setelah mengetahui sumber dana yang ada, selanjutnya sekolah/madrasah membuat RAPBS yang merupakan suatu tuntutan manajemen modern bahwa lembaga pendidikan formal memiliki anggaran setiap tahun baik berupa rencana pendapatan/penerimaan maupun rencana belanja/pengeluaran, sehingga program disusun dengan memperhatikan unsur pembiayaan agar program terlaksana dengan baik. Program kegiatan sekolah dan sumber pendapatan untuk membiayai program itu merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara

²⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi Dan Aplikasi* (Surabaya: Kartika, 2009), 132

satu dengan yang lain yang disebut *Program Budgeting Sistem* (PBS).²⁵

Sistem ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala sekolah, siswa, dan orang tua dalam mengendalikan proses pendidikan ditingkat sekolah.²⁶

Kepala sekolah bersama komite sekolah berkewajiban menyusun RAPBS setiap tahun dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunan dibawah ini:

- (a) Menginventarisir melalui diskusi
- (b) Menginventarisir sumber dana
- (c) Merumuskan dan menetapkan program kegiatan
- (d) Menetapkan besarnya anggaran
- (e) Melakukan analisis setiap butir program kegiatan
- (f) Menetapkan satuan program kegiatan yang definitif
- (g) Mensosialisasikan program kegiatan
- (h) Mengajukan kepada kepada pemerintah.²⁷

Berdasarkan hal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Langkah pertama, menginventarisir melalui diskusi tentang program kegiatan sekolah pada tahun yang akan datang, baik program rutin maupun pembangunan yang realistis dan feasible yakni yang dapat dikerjakan dan dapat dibiayai.

Langkah *kedua*, menginventarisir sumber dana/pembiayaan yang memungkinkan diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

²⁵ Nurdin matry , *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah* (Makasar: Aksara Madani, 2008),175

²⁶ Dedi supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 18

²⁷ Ibid, 175-176□

Langkah ketiga, merumuskan dan menetapkan program kegiatan. Rumusan kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan dari semua unsur yang terkait, seperti komite sekolah, dewan guru, kepala tata usaha bahkan dari pimpinan OSIS di sekolah yang bersangkutan.

Langkah keempat, menetapkan besarnya anggaran yang diperlukan pada setiap sektor kegiatan serta sumber pembiayaannya.

Langkah kelima, melakukan analisis setiap butir program kegiatan didasarkan atas ketersediaan dana urgensi pada setiap satuan program kegiatan dengan menyusun skala prioritas.

Langkah keenam, menetapkan satuan program kegiatan yang definitif berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan tingkat urgensi satuan program itu.

Langkah ketujuh, mensosialisasikan program kegiatan itu dan sumber dan pembiayaan kepada program kegiatan itu dan sumber dana pembiayaan kepada seluruh komponen sekolah termasuk komite sekolah.

Langkah kedelapan, mengajukan kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat.

Dari delapan langkah-langkah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun RAPBS kepala sekolah dan komite

sekolah harus mendiskusikannya terlebih dahulu untuk kemudian membuat program yang sesuai dengan dana yang ada.

2) Pengembangan anggaran

Proses pengembangan belanja sekolah (RAPBS) pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan sebagai berikut.

a) Pada tingkat kelompok kerja

Kelompok kerja yang dibentuk sekolah terdiri dari pembantu sekolah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai kebutuhan.

Dari biaya hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan oleh kelompok kerja selanjutnya dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar maka dapat dilakukan pengurangan biaya dengan dana yang tersedia.

b) Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah

Kerjasama antara komite sekolah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk di atas, dilakukan untuk melakukan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka pengembangan

kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

c) Sosialisasi dan legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah disosialisasi kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada kantor inspeksi pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.²⁸

Sasaran (tujuan jangka pendek atau tujuan situasional) dari pengembangan sumber dana pendanaan atau pembiayaan pendidikan adalah terpenuhinya sumber dana dan pendanaan pendidikan yang sesuai SNP sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain:²⁹

- a) Sosialisasi pendanaan pendidikan
- b) Penggalan sumber dana dari luar sekolah
- c) Penggalan dana pendidikan
- d) Penyusunan anggaran pendidikan
- e) Pengembangan unit-unit sekolah

b. Pelaksanaan anggaran

Dalam menggunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman yaitu azas umum pengeluaran anggaran, bahwa manfaat

²⁸ Mulyasa, *Menjadi kepala sekolah profesional*, 200-201

²⁹ Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar & Praktik*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 58

penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, hemat dan sebagainya.

Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dalam bidang keuangan dimaksudkan untuk mengatur alokasi anggaran pada sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran. Peraturan alokasi anggaran pada sasaran tertentu menjadi pedoman kerja petugas bidang keuangan terutama bendahara sekolah yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan disekolah dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: pelaksanaan anggaran, pengelolaan anggaran, prinsip keterbukaan/transparansi, kemampuan menyerap, dan pembagian tugas yang jelas.³⁰ Dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan anggaran harus direncanakan dengan baik berdasarkan kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelajaran.

Kedua, pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan ketentuan keuangan yang diatur oleh pejabat berwenang khususnya dalam bidang administrasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

³⁰ Matry Nurdin, *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen*, 178-179

Ketiga, prinsip keterbukaan / transparansi dalam penggunaan keuangan sekolah perlu dilakukan, terutama dana yang bersumber dari masyarakat, komite sekolah dan dana dari pemerintah.

Keempat, kemampuan menyerap anggaran yang dimaksudkan semata-mata untuk membiayai program kegiatan (dipakai habis), bukan menghabiskan anggaran dengan tidak terarah atau dengan cara boros.

Kelima, pembagian tugas yang jelas antara urusan umum yang tugasnya membeli barang dan jasa serta fungsi bendaharawan yang membayar barang dan jasa yang dipesan oleh urusan umum, sesuai faktor barang dan penagihan jasa.

Dari kelima prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran harus direncanakan dan dikelola dengan baik oleh stakeholder secara transparan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Terdapat dua hal yang terdapat dalam kegiatan pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Penerimaan

Penerimaan menggambarkan atas besarnya dana yang diterima lembaga dari setiap dana.³¹ Sumber keuangan pada sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun

³¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2008), 258

kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Pendanaan pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memperoleh pendidikan sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُؤْلٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)³²

Berikut penjelasan mengenai tiga sumber pendanaan pendidikan.

a) Pemerintah

Kebanyakan anggaran provinsi yang tertuang dalam APBD adalah lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang berasal dari pusat, hal ini mencerminkan terjadinya penyimpangan terhadap azas formal yang dianut, sebab kenyataannya fungsi utama dari dinas otonomi adalah menjadi pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai pusat merupakan program-program pembangunan nasional yang dijalankan mendorong timbulnya sentralisasi pengawasan sekaligus fragmentasi pnggunaannya melalui pendekatan sektoral.

³² Zainuddin Hamidy dkk, terjemahan hadis shahih Bukhari (Jakarta: Widjaya, 2009), 47

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 46 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Dalam buku pedoman rencana, program dan penganggaran dikemukakan bahwa sumber dana pendidikan dari pemerintah antara lain meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, dana penunjang pendidikan.

b) Orang tua

Orang tua membayar ujian sekolah, ujian, sumbangan untuk peserta didik baru, laboratorium dan sebagainya menurut Zymelman adalah mencapai tujuan. Anggaran yang berasal atau berasal dari pemerintah (*Social Demand*) dapat dipastikan tidak akan mencukupi, karena jumlah sekolah dan peserta didiknya yang demikian besar.³⁴

Banyak orang tua peserta didik yang rela membayar lebih tinggi untuk pendidikan putra-putrinya dengan harapan memperoleh layanan pendidikan yang diharapkan, artinya peningkatan kualitas yang lebih baik dari putra-putri tercinta. Partisipasi orang tua untuk menanggung biaya pendidikan akan meningkat apabila sekolah dapat memberikn pelayanan

³³ Sinar Grafika, Undang-Undang SISDIKNAS

³⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Stratejik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 228

yang lebih baik terhadap masyarakat. Karena kerelaan membayar biaya pendidikan akan timbul sebagai bagian adanya rasa kepuasan yang diperoleh orang tua untuk turut menikmati kualitas yang diperoleh putra-putri mereka.

c) Masyarakat

Tiap-tiap sekolah dapat memberdayakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dana sekolah. Undang-undang sistem pendidikan nasional no. 20 tahun 2003 mengemukakan pengadaan dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik. Hal ini menunjukkan orang tua yang bergabung dalam komite sekolah menjadi demikian penting dapat langsung menandatangani persoalan anggaran di sekolah dengan rincian yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

Program manajemen berbasis sekolah/madrasah bukan pemindahan tanggung jawab anggaran pemerintah terhadap masyarakat, melainkan sebagai upaya peningkatan mutu secara terus menerus, dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah kewenangan sekolah tetap penuh dan profesional. Strategi pengembangan manajemen berbasis sekolah/madrasah dapat dilakukan dengan *top down* (atas bawah). Hal ini membutuhkan "*political will*". Strategi lainnya *bottom up*

(bawah atas) yang datangnya dari masyarakat dan sekolah sebagai kebutuhan yaitu kebutuhan akan mutu pendidikan datangnya dari bawah.³⁵

2) Pengeluaran

Pengeluaran menggambarkan besarnya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program.³⁶ Chon mengatakan bantuan keuangan sekolah lanjutan hampir seluruhnya dibiayai oleh dana pemerintah dan bagi sekolah swasta dana yang diberikan terbatas. Administrator pendidikan perlu meneliti untuk memutuskan pilihan jumlah biaya keseluruhan suatu program pendidikan. Untuk mengetahui arah yang akan diambil, terlebih dahulu harus diketahui kedudukan pendidikan sekarang pemimpinnya dengan meneliti berapakah biaya yang dipergunakan, apakah angka-angka yang biasanya dikemukakan pada pilihan benar-benar biaya yang harus diperhitungkan pengeluaran tersebut antara lain gaji guru, pemeliharaan gedung, biaya perobatan, buku-buku, bahan-bahan pelajaran di laboratorium, alat peraga pendidikan dan alat tulis.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya segenap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di

³⁵ Ibid, 229

³⁶ *Manajemen Administrasi Pendidikan*, 259

sekolah. Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggung jawaban pembukuan, meliputi buku kas harian, buku tabelarasi dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat dengan waktu serta peruntukannya. Sebagaimana tertuang dalam PP No 48 tentang pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP No 48 tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.³⁷ Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi: a) biaya investasi, b) biaya operasional, c) bantuan biaya pendidikan, d) beasiswa.

³⁷ Depag RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis* (Jakarta: Depag RI, 2009), 10□

- b) Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- c) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga jenis biaya pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menunjang pendidikan yang baik, sekolah harus mengelola semua dana yang ada sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan / atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.³⁸ Evaluasi merupakan bagian integral dari pengelolaan pendidikan, baik ditingkat mikro (sekolah), meso (dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi), maupun makro (departemen). Aplikasi fungsi pengawasan dalam bidang keuangan dilakukan secara rutin oleh atasan langsung bendaharawan yakni kepala sekolah dalam kerangka building control atau pengawasan melekat. Selain itu, melakukan pengawasan secara

³⁸ Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 7

insidenril dari amparat pengawasan dari departemen bersangkutan dan pengawas keuangan pembangunan. Hasil pengawasan ini bermanfaat memperbaiki kinerja petugas dalam bidang keuangan.

Agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriterian yang harus diperhatikan, yaitu (1) berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, (2) obyektif, (3) lengkap, (4) tepat pada waktunya, (5) dapat diterima.

Pelaksanaan fungsi penilaian dalam bidang keuangan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi pengawasan. Hasil pengawasan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan menjadi bahan utama dalam memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan. Adapun yang akan dibahas dalam evaluasi keuangan adalah mengenai kesesuaian anggaran dan pertanggung jawaban keuangan.

1) Kesesuaian anggaran

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk upiah untuk jangka waktu tertentu (periode), serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian aktivitas. Anggaran memiliki peran penting didalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seseorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporka realisasinya

sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. Ada tiga bagian pokok anggaran suatu unit pemerintah yaitu:

- a) Target penerimaan
- b) Rencana pengeluaran
- c) Sumber dana lainnya, yaitu sisa dana periode sebelumnya menjadi saldo awal periode berjalan.

2) Pertanggung jawaban keuangan

Pertanggung jawaban merupakan transparansi dalam mengelola keuangan. Model/bentuk keuangan dapat berbeda-beda sesuai dengan sumber anggarannya. Pada prinsipnya pertanggung jawaban tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan dari donatur atau sumber anggaran. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus dijunjung tinggi.³⁹

Pertanggung jawaban pemerintah dan pengeluaran keuangan sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada: (1) Kepala Dinas Pendidikan, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), (3) Kantor Dinas Pendidikan.

Pertanggung jawaban yang dikenal dengan uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada

³⁹ Sulthon dan khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: LaksBang PREEsindo, 2006), 267

pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketetapan waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah bentuk pertanggung jawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.

Semua bentuk kegiatan yang sedang maupun yang sudah dilaksanakan perlu adanya evaluasi atau pengawasan sebagaimana firman Allah dalam surat Qaff ayat 17-18 yang berbunyi:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf: 17-18)⁴⁰

2. Mutu Pendidikan

Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum.⁴¹

Mutu atau kualitas adalah ukuran baik atau buruk suatu benda, keadaan, taraf, atau derajat (kecerdasan, kepandaian dan sebagainya).⁴²

Menurut Umiarso dan Imam Gojali mendefinisikan mutu adalah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa.⁴³

Jadi dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang

⁴⁰ Al-Qur'an, 50:17-18

⁴¹ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, 56.

⁴² Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 231

⁴³ Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah*, 124

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Mutu pendidikan harus juga diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh perubahan terencana. Peningkatan mutu diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada akademis untuk memberikan dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh dan mencapai mutu yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata, dan bermakna. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mujadilah: 11)⁴⁴

⁴⁴ Al-Qur'an, 58:11

Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi: (1) prestasi akademik, nilai rapor dan nilai yang memenuhi standar; (2) prestasi non akademik yang berkaitan dengan kedisiplinan, olahraga dan kesenian.

a. Prestasi akademik

1) Nilai ulangan harian

Ulangan harian yang dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam kompetensi dasar tersebut. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas yang terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi peserta didik.⁴⁵

2) Nilai ulangan umum

Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester, dengan bahan yang diujikan sebagai berikut:

- (a) Ulangan umum semester pertama soalnya diambil dari semester pertama

⁴⁵ Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: PT Rosdakarya, 2008), 258-259

- (b) Ulangan umum semester kedua soalnya merupakan gabungan dari materi semester pertama dan kedua, dengan penekanan pada materi semester kedua.

Ulangan umum dilaksanakan secara bersama untuk kelas-kelas paralel, dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama, baik tingkat rayon, kecamatan, kota/kabupaten maupun provinsi. Hal ini dilakukan terutama dimaksudkan untuk peningkatan pemerataan mutu pendidikan dan menjaga keakuratan soal-soal yang diujikan.

3) Ulangan akhir nasional

Ujian nasional biasa disingkat UN/UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Prestasi non akademik

1) Kedisiplinan

Disiplin merupakan suatu yang penting untuk menanamkan rasa hormat terhadap kewenangan, menanamkan kerjasama, dan rasa hormat kepada orang lain.⁴⁶

2) Olahraga

Olahraga adalah suatu gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh (seperti sepak bola, berenang, lempar lembing).⁴⁷

3) Kesenian

Kata seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari kehalusannya, keindahannya); karya yang dapat diciptakan dengan keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran.

Jadi maksud dari manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, prestasi sekolah, dan mutu pendidikan disekolah MA Ma'arif NU Kencong.

Pembiayaan pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah

⁴⁶ Mulyasa, *kurikulum*, 118

⁴⁷ KBBi Offline1.3

bersama komponen lainnya. Karena pada umumnya komponen tersebut dihadapkan pada masalah keterbatasan dana sehingga dengan adanya manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan ini menjadi solusi dari keterbatasan dana yang biasanya dialami oleh madrasah-madrasah swasta di Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁸ Dalam melakukan penelitian tentang manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember ini peneliti menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan hal lain secara holistik.⁴⁹

Sedangkan jenis yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi yaitu dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang terhadap orang-orang tertentu. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengungkap pemahaman, mengkonstruksi pemikiran dan mengetahui makna dibalik fenomena manajemen pembiayaan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 3.

⁴⁹ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rema Rosda Karya, 2008), 6.

berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵⁰ Lokasi yang peneliti jadikan subjek adalah MA Ma'arif NU Kencong Jember yang memiliki tempat cukup strategis, karena berada di pinggir jalan raya dan beralamat di Jl. KH. Agus Salim No.15-17 Kencong Jember, dengan kode pos 68167. Peneliti memilih MA Ma'arif NU Kencong karena di MA Ma'arif NU Kencong ini manajemen pembiayaannya sangatlah bagus. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih MA Ma'arif NU Kencong dalam bidang akademik maupun non akademik siswa.

3. Subjek Penelitian

Dalam menentukan obyek dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵¹

Data yang didapat peneliti di sini adalah pendapat dan pengalaman tenaga manajemen pembiayaan, terkait dengan manajemen pembiayaan.

Informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala madrasah
- b. Bendahara madrasah
- c. Komite madrasah

⁵⁰ Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 134

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2014), 218.

d. 2 wali murid

4. Teknik Pengumpulan Data

Data tentang manajemen pembiayaan berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember, dapat diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut penjelasan dari masing-masing teknik tersebut.

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung.

Data yang dicari peneliti dari teknik observasi non partisipan ini adalah :

- 1) Lokasi atau tempat MA Ma'arif NU Kencong Jember.
- 2) Manajemen pembiayaan yang digunakan oleh tenaga manajemen pembiayaan MA Ma'arif NU Kencong Jember.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara.⁵² Adapun wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu Wawancara hanya berisi garis besar data yang ingin

⁵² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember, STAIN Jember Press,2013), 185.

diperoleh saja.⁵³ Dan pewawancara boleh menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu untuk dipertanyakan. Pertanyaan yang diajukan pun tidak selalu dalam urutan yang sama, bahkan pertanyaanpun tak selalu sama.

Data yang dicari peneliti dengan teknik wawancara tidak terstruktur adalah data tentang manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁴

Data yang dicari peneliti dengan teknik dokumentasi ini adalah:

- 1) Sejarah berdirinya MA Ma'arif NU Kencong Jember.
- 2) Profil MA Ma'arif NU Kencong Jember.
- 3) Visi misi MA Ma'arif NU Kencong Jember.
- 4) Tujuan MA Ma'arif NU Kencong Jember.
- 5) Dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian manajemen pembiayaan berbasis madrasah di MA Ma'arif NU Kencong Jember.

⁵³ Ibid, 185.

⁵⁴ Ibid, 186.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya.

Metode analisis data deskriptif dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁵⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adanya penyajian data dapat mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

⁵⁵ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 62.

c. Verifikasi

Yakni penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan dengan ini dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Temuan-temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas.

6. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengujian validitas data yang diperoleh peneliti menggunakan triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

Teknik pemeriksaan keabsahan data dimana dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan melakukan berbagai cara dan berbagai waktu, hal tersebut dilakukan dengan cara:⁵⁶

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 260.

- 3) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat pandangan orang lain.
- b. Triangulasi Teknik yaitu digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data seperti yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tidak lupa pula peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan di lapangan. Setelah triangulasi sumber peneliti lakukan dilanjutkan dengan triangulasi teknik untuk mengecek keabsahan data. Sehingga data yang peneliti inginkan telah mencapai data jenuh.

7. Tahapan Penelitian

Agar proses penelitian terlaksana secara sistematis sehingga juga mempermudah peneliti dalam menyusun hasil penelitian ini, yaitu :

- a. Pra Penelitian
 - 1) Mencari lembaga pendidikan berbasis Islam
 - 2) Melakukan observasi
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - 1) Tahap pengumpulan data
 - a) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian.

- b) Mentranskrip hasil wawancara dengan para narasumber.
- c) Mencari bukti dengan melakukan observasi di lapangan.
- d) Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian.

2) Mengidentifikasi data

- a) Mengelola hasil data wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan metode analisis data Milles dan Huberman.
- b) Dalam menganalisa hasil data tersebut peneliti juga sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan referensi data.

c. Tahap Akhir Penelitian

Setelah melakukan analisa peneliti merumuskan hasil data tersebut sesuai dengan sistem penulisan skripsi IAIN Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah MA Ma'arif NU Kencong

Lembaga pendidikan ini berdiri pada tahun 1979, hal ini atas permintaan dan persetujuan masyarakat setempat untuk diadakannya sebuah lembaga pendidikan, karena berkembangnya masyarakat dan pertumbuhan penduduk maka masyarakat sekitar menginginkan adanya lembaga pendidikan resmi. Akan tetapi lembaga yang pertama kali didirikan adalah MTs Ma'arif NU Kencong Jember, sebagai sarana mengajar pada anak-anak sekitar. Mengingat lembaga yang setara dengan MA itu jauh lokasinya.

Kemudian, atas ridho Allah dan atas respon positif masyarakat sekitar, maka K.H. Jauhari Zawawi meresmikan lembaga pendidikan MA Ma'arif NU Kencong Jember.⁵⁷

a. Nama Lengkap Madrasah

Nama lengkap Madrasah adalah Madrasah Aliyah Ma'arif, merupakan kelanjutan dari Pendidikan Guru Agama Lengkap (PGAL) NAHDLATUL ULAMA' yang selanjutnya diubah menjadi Pendidikan Guru Agama Lengkap (PGAL) Ma'arif.

⁵⁷ Dokumentasi MA Ma'arif NU Kencong

b. Tingkatan Madrasah

Karena Madrasah Aliyah ini adalah merupakan perubahan dari PGAL Ma'arif, maka lembaga pendidikan tersebut menjadi dua yaitu Madrasah Tsanawiyah (setingkat SLTP) dan Madrasah Aliyah (setingkat SLTA), dengan jenjang pendidikan selama 3 (tiga) tahun.

c. Status Madrasah

Status Madrasah adalah swasta, terdaftar pada Departemen Agama dengan mendapatkan bantuan guru negeri sejak masih bersetatus PGAL. Kurikulum yang di pakai adalah kurikulum dari Madrasah Aliyah Negeri di padukan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif dengan perincian sebagai berikut : Jam pelajaran sesuai dengan Kurikulum Depertemen Agama ditambah 6(enam) jam pelajaran yang dimasukkan ke dalam pelajaran agama.⁵⁷

d. Tahun Berdirinya

Tahun berdirinya Madrasah Aliyah Ma'arif Kencong adalah pada tahun ajaran 1979/1980 atau pada tanggal 22 Juli 1979.

e. Pendiri Madrasah⁵⁸

1) Pemrakarsa :

Yang mempunyai gagasan pertama berdirinya pendidikan yang kemudian diberi nama Pendidikan Guru Agama Pertama Nahdlatul Ulama' adalah Bapak K.H. Jauhari Zawawi sebagai Rois

⁵⁷ Dokumentasi MA Ma'arif NU Kencong

⁵⁸ Dokumentasi MA M'arif NU Kencong

Syuriyah Cabang NU Kencong, karena didorong suatu kelanjutan anak didik dari Madrasah Ibtidaiyah yang sudah ada sebelumnya.

2) Pendukung dan Pendorong :

Gagasan tersebut disampaikan saat diadakan pertemuan pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kencong yang akhirnya disetujui berdirinya sekolah tersebut.

Jadi pendukung dan dorongannya adalah Pengurus Nahdlatul Ulama' Kencong yang terdiri dari :

- a) Bapak K.H. Abdul Hayyi,
- b) Bapak K.H. Badruddin,
- c) Bapak K.H. Syafawi,
- d) Bapak K.H. Syarif,
- e) Bapak H. Abdul Jalal,
- f) Bapak H. Ahmad Thowie,
- g) Bapak Joyowisastro,
- h) Bapak K. Abdul Rosub,
- i) Bapak Basuki Abdullah,

f. Alasan Didirikannya Madrasah

Alasan didirikannya Madrasah adalah sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Masih belum adanya sekolah lanjutan di daerah Kecamatan Kencong yang;
- 2) Bernaung pada Lembaga Pendidikan Ma'arif .

⁵⁹ Dokumentasi MA Ma'arif NU Kencong

- 3) Merupakan kelanjutan pendidikan dari pendidikan dasar yang telah ada.
- 4) Ingin ibadah lewat pendidikan, dengan mengadakan pengelolaan sekolah secara baik.
- 5) Menampung para anak didik khususnya dari warga NU.

g. Tujuan Pendiannya

- 1) Mencetak para kader nahdliyyin yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulunya.
- 2) Sebagai wadah pembinaan para remaja yang belajar agama disamping pendidikan umum yang sama dengan lembaga yang mengadakan pendidikan umum.
- 3) Sebagai sarana untuk menampung para kader yang akan berjuang lewat pendidikan.
- 4) Sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran ahlus sunnah wal jama'ah

h. Usaha – Usaha Dalam Rangka Melestarikan Madrasah

Madrasah dapat dilestarikan apabila memenuhi beberapa persyaratan (pendukung) yang terdiri dari :

- 1) Mempunyai gedung tempat kegiatan belajar mengajar,
- 2) Ada guru yang mengelola madrasah,
- 3) Ada siswa yang belajar,
- 4) Di tunjang dengan adanya dana ,

Untuk memenuhi persyaratan tersebut pengurus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membangun gedung yang permanen yang memenuhi persyaratan pendidikan,
- b) Mengangkat guru-guru yang dianggap layak untuk mengajar,

Karena madrasah ini dalam naungan lembaga pendidikan ma'arif maka dalam rangka untuk mendapatkan siswa yang memadai diadakannya kerja sama dengan sekolah sekolah yang juga di bawah naungan LP Ma'arif untuk menggiring para siswanya yang telah keluar dari pendidikan lanjutan pertama untuk dapatnya masuk ke Madrasah Aliyah, Di bidang dana disamping dari intra sekolah sendiri berupa SPP dan dana yang lain, juga berusaha untuk mencari donatur dari warga yang di anggap mampu.

2. Lokasi MA Ma'arif NU Kencong

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalur kereta api
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan warga.
- c. Sebelah barat berbatasan langsung dengan jalan.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan SD Kencong 2.

⁶⁰ Observasi MA Ma'arif NU Kencong

3. Profil MA Ma'arif NU Kencong

Identitas MA Ma'arif NU Kencong sebagai berikut:⁶¹

- a. Nama Lengkap : MA Ma'arif NU Kencong
- b. NPSN : 20580284
- c. Alamat : Jala KH. Agus Salim 15-17
- d. Kelurahan/Desa : Kencong
- e. Kecamatan : Kencong
- f. Kabupaten : Jember
- g. Profensi : Jawa Timur
- h. Telp/Hp : 0336 321713
- i. Setatus tanah : Milik Sendiri
- j. Setatus (Negeri/Swasta) : Swasta
- k. Tahun Berdiri : 1978
- l. Hasil Akreditasi : A

4. Visi Dan Misi MA Ma'arif NU Kencong

a. Visi Madrasah

*“Terwujudnya Insan Berprestasi, Islami dan Akhlaqul Karimah”*⁶²

Indikator dari visi di atas adalah:

- 1) Unggul dalam perolehan nilai UN.
- 2) Unggul dalam bidang olah raga dan seni.

⁶¹ Dokumentasi MA Ma'arif NU Kencong

⁶² ibid

- 3) Berprestasi dalam bidang ketrampilan.
- 4) Unggul dalam kegiatan keagamaan.
- 5) Berbudi luhur dalam kehidupan sehari-hari.

b. Misi Madrasah

- 1) Melaksanakan paikem (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan)
- 2) Meningkatkan kualitas belajar siswa melalui bimbingan belajar tambahan.
- 3) Meningkatkan pembinaan olah raga sepak bola dan volley.
- 4) Meningkatkan pembinaan seni hadrah/ al banjari.
- 5) Membekali siswa dengan ketrampilan menjahit, sablon dan elektronika.
- 6) Mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama.
- 7) Melaksanakan pembiasaan perilaku islami.

5. Tujuan MA Ma'arif NU Kencong

Mengacu pada visi dan misi madrasah, serta tujuan umum pendidikan menengah, maka tujuan madrasah kami dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Meningkatkan nilai UN dari : menjadi rata-rata 6.00 pada tahun 2019/2020.
- b. Memiliki tim sepak bola dan volley yang menjadi juara tingkat Kabupaten pada tahun 2018/2019.

⁶³ Dokumentasi MA Ma'arif NU Kencong

- c. Memiliki group hadrah al-banjari juara tingkat Jawa Timur pada tahun 2018/2019.
- d. Memiliki lulusan yang mempunyai kompetensi dalam bidang menjahit, sablon dan elektronika.
- e. Memiliki lulusan yang taat ibadah dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.
- f. Memiliki lulusan yang berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

B. PENYAJIAN DATA

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa teknik perolehan data dari penelitian melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan *reliable* sebagai sebuah hasil dari sebuah penelitian. Metode yang digunakan adalah untuk menjawab fokus permasalahan di MA Ma'arif NU Kencong.

1. Perencanaan Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sekolah/madrasah berperan membantu keluarga dan masyarakat melaksanakan fungsi pendidikan. Sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan terdepan dalam mendidik para peserta didiknya memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi tugasnya. Di madrasah guru tidak berkuasa dalam segala hal, dan madrasah tidak lagi efektif dalam mengajarkan kecakapan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sekolah diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya salah satunya dengan menyusun perencanaan dan pelaksanaan program madrasah didukung anggaran yang tersedia dan yang mungkin dapat disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suwoto selaku kepala madrasah mengungkapkan:

Perencanaan yang diterapkan di sekolah yaitu berdasarkan rapat tim para waka. Perencanaan pembiayaan ini kami lakukan melihat kenyataan tahun lalu atau menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Proses penyusunan anggaran itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan apa yang sangat penting untuk diadakan.⁶⁴

Perencanaan memang hal yang paling utama dalam mencapai tujuan. Karena perencanaan merupakan proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu.

Senada dengan interview ibu Jami'ah selaku bendahara mengungkapkan:

Untuk masalah penyusunan anggaran harus tahu prosedur yang akan dicapai dengan cara menganalisis kebutuhan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Karena setiap dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan dana ini memerlukan bukti atau data yang lengkap sehingga sekolah dapat megantisipasi dan melakukan perbaikan dalam menyusun anggaran yang akan datang.⁶⁵

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai

⁶⁴ Suwoto, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

⁶⁵ Jami'ah, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

tersebut, berapa orang personal yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sodikun selaku komite sekolah:

Dalam penyusunan RAPBS atau rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM), kepala madrasah bersama tim menyeleksi kegiatan apa saja yang harus dibiayai sesuai dengan kategori program pendidikan yang diselenggarakan atau ditingkatkan pada tahun ini. Berdasarkan seleksi dan identifikasi itu tim kemudian menyusun RKAM. Perencanaan keuangan madrasah itu difokuskan pada peningkatan pembelajaran siswa secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.⁶⁶

Jadi hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong adalah mengidentifikasi kebutuhan dengan menyusun skala prioritas tentang kebutuhan yang ingin dicapai. Dan dalam membuat perencanaan tentang pembiayaan sekolah melihat pelaksanaan yang sudah dilakukan tahun lalu.

Dalam penyusunan anggaran harus mengetahui prosedur yang ingin dicapai dengan menentukan skala prioritas. Dan dalam membuat perencanaan ini sekolah membuat tim untuk menyusunnya. Tim ini terdiri dari para waka, bendahara, komite madrasah beserta kepala madrasah. Kemudian setelah menentukan skala prioritas anggaran dikembangkan sesuai skala tersebut. Perencanaan keuangan madrasah itu benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran siswa secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan.

⁶⁶ Sodikun, Wawancara, Kencong, 22 Agustus 2017

2. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Kepala madrasah, sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga yang dia pimpin. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Dalam hal ini kepala madrasah sebagai pengawas dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan ini. Tugas-tugas mengenai pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing person yang sudah memiliki *job description*.

Suwoto selaku kepala sekolah mengatakan:

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini madrasah memperoleh dana dari pemerintah yang berupa BOS dan dari orang tua siswa yang berupa SPP. Kalau dulu dana BOS turun pertriwulan tapi semenjak 2016 dana BOS turun persemester. Tapi dana sering turun terlambat akibatnya madrasah kekurangan dana sehingga madrasah harus pinjam dulu kemudian setelah dana BOS turun baru madrasah membayar. Madrasah menerima dana BOS sebesar Rp133.000.000/semester dan untuk SPP Rp 95.000/siswa.⁶⁷

Jadi pendapatan madrasah yang bersumber dari pemerintah yang berbentuk BOS dan dari orang tua yang berbentuk SPP untuk satu semester adalah Rp 133.000.000 + Rp 165.300.000 (Rp 95.000 x 290

⁶⁷ Suwoto, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

siswa x 6 bulan) = Rp 298.300.000. Jika dihitung satu tahun adalah
Rp298.300.000 x 2 = Rp 596.600.000

Senada dengan Jami'ah selaku bendahara madrasah yang mengatakan:

Selain dana dari pemerintah yang berupa BOS dan dari orang tua yang berupa SPP sekolah juga mendapatkan tambahan atau penghasilan dari koperasi siswa. Koperasi ini menjual peralatan sekolah kostum beserta atribut sekolah dan yang membuatnya adalah siswa yang mempunyai keahlian dalam bidang ini. Dalam hal ini para siswa juga akan digaji sesuai dengan pekerjaan mereka. Siswa di madrasah diasah tentang keterampilan mereka dengan berbagai ekstra kurikuler yang ada. Kostum olahraga, atribut dan kerudung didapatkan dari ekstra kurikuler menjahit dan sablon. Oleh karena itu APBM dapat bertambah sehingga mendapatkan nilai plus untuk peningkatan mutu madrasah.⁶⁸

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan membutuhkan koordinasi antara stakeholder yang berkenaan dengan pembiayaan sekolah. Sekolah harus kreatif dalam memanfaatkan potensi siswanya. Hal ini akan meningkatkan mutu madrasah karena selain siswa mempunyai kompetensi sekolah juga mendapatkan tambahan dana.

Hal senada juga dikatakan bapak Sodikun selaku komite madrasah yang mengatakan:

Kegiatan merencanakan sumber dana dan pengeluaran pendidikan dalam membiayai kegiatan-kegiatan madrasah serta besarnya harus sudah dapat dihitung sebelumnya. Sumber dana dari bantuan pemerintah dan orang tua, sedangkan komponen-komponen pengeluarannya harus disesuaikan dengan besarnya penerima.⁶⁹

⁶⁸ Jami'ah, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

⁶⁹ Sodikun, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

Berdasarkan wawancara bapak Suwoto selaku kepala madrasah juga mengatakan:

Penggunaan dana yang diterima madrasah adalah sesuai Standar Nasional Pendidikan pada bidang standar pembiayaan, termasuk didalamnya digunakan untuk UKK, UN, honor guru, sarpras, membantu siswa miskin yang mempunyai SKTM, dansos.⁷⁰

Berdasarkan wawancara ibu Jami'ah selaku bendahara madrasah mengatakan:

Bendahara membuat buku kas sebagai pembukuan keluar masuknya uang dan pembukuan ini diatur berdasarkan kelas. Kemudian dalam evaluasi saya membuat laporan yang berupa LPJ yang nanti akan saya setorkan kepada kepala madrasah.⁷¹

Dalam hal ini peneliti juga meminta pendapat wali murid mengenai manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong dimana pendapatan madrasah selain dari pemerintah, juga berasal dari orang tua.

Berikut wawancara peneliti dengan ibu Narti selaku wali murid mengatakan:

Saya membayari SPP anak saya setiap tanggal 7 tiap bulan dengan jumlah Rp 95.000. Saya membayarnya langsung ke madrasah sambil bertanya pengembangan putri saya selama di madrasah. Saya juga biasanya hadir ke madrasah ketika diundang rapat wali murid untuk membahas masalah pembiayaan dan prestasi siswa di madrasah.⁷²

Ibu Yuni selaku wali murid juga mengatakan:

Saya membayari SPP anak saya sekitar tanggal 1-10. Saya memberi uang SPP kepada anak saya untuk dibayarkan ke

⁷⁰ Suwoto, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

⁷¹ Jami'ah, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

⁷² Narti, wawancara, Kencong 25 Agustus 2017

madrasah. Saya datang ke madrasah setiap ada undangan rapat wali murid untuk membahas pembiayaan dan pembagian rapot.⁷³

Orang tua tidak hanya membiayai anaknya tetapi peran orang tua yaitu juga turut serta mengawasi anaknya serta selalu melihat perkembangan anaknya selama di sekolah.

Jadi pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah mencari sumber dana madrasah. Dalam hal ini madrasah mendapatkan dana dari pemerintah yang berupa dana BOS dan dari orang tua siswa yang berupa SPP. Dana BOS keluar setiap semester, tetapi turunnya dana ini sering kali tidak tepat waktu atau bisa dikatakan terlambat. Hal ini membuat sekolah tidak mempunyai dana untuk pembenahan. Untuk mengatasi hal ini maka sekolah mempunyai inisiatif untuk pinjam terlebih dahulu, kemudian setelah dana BOS itu turun sekolah baru membayarnya. Sekolah juga mendapatkan dana dari SPP siswa yang dibayar setiap satu bulan sekali.

3. Evaluasi Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari sepuluh langkah strategi program. Evaluasi adalah mengukur keberhasilan atau kegagalan proses-proses strategis dalam pengukuran standar demi pencapaian misi sebagai masukan bagi pembuatan keputusan berikutnya dari hasil program yang dibuat. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi

⁷³ Yuni, wawancara, Kencong 25 Agustus 2017

sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau yang telah dilaksanakan.

Suwoto selaku kepala sekolah mengatakan:

Evaluasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Dan yang melakukan evaluasi yaitu kepala madrasah beserta komite madrasah. Bentuk pelaporannya yaitu berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) madrasah yang dibuat oleh bendahara. Setelah bendahara menyusun LPJ maka bendahara akan memberikan LPJ kepada kepala madrasah. Kemudian karena madrasah ini dibawah lindungan yayasan maka kemudian kepala madrasah dan komite madrasah mengLPJkan ke yayasan.⁷⁴

Dalam kegiatan pengawasan ini adalah untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerja sama antara kepala madrasah, bendahara madrasah dan komite madrasah. Data itu dipakai untuk mengidentifikasi apakah proses pencapaian tujuan melalui proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sodikun selaku komite madrasah mengatakan:

Yang mengawasi keuangan ya dari pihak yayasan sendiri karena keuangan terpusat pada yayasan. Dan dari pihak madrasah yang mengawasi adalah kepala madrasah dan komite madrasah.⁷⁵

Proses kerjasama pedidikan harus dinilai untuk melihat apakah tujuan yang harus ditetapkan tercapai, dan kalau tidak apakah hambatan-

⁷⁴ Suwoto, Wawancara, Kencong 1 Agustus 2017

⁷⁵ Sodikun, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

hambatannya, penilaian ini dapat berupa proses kegiatan atau hasil kegiatan.

Suwoto selaku kepala sekolah juga mengatakan:

Pengawasan yang dilakukan dalam hal pembiayaan adalah pembukuan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pihak madrasah yang berupa LPJ serta segala pembenahan yang dilakukan madrasah.⁷⁶

Pengawasan meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Jadi evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong adalah di setiap pembenahan. Adapun untuk pertanggung jawabannya adalah setiap satu tahun sekali yang dibuat oleh bendahara dan melaporkannya kepada kepala madrasah. Kemudian kepala madrasah beserta komite madrasah mengLPJkan kepada ketua yayasan.

Dibawah ini adalah tabel hasil dari fokus masalah dengan temuan yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil dari fokus penelitian dengan temuan

No	Fokus penelitian	Hasil yang diperoleh
1	Perencanaan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong tahun pelajaran	kepala madrasah bersama tim membuat RKAM dengan cara menganalisis kebutuhan yang ingin dicapai pada tahun ini.

⁷⁶ Suwoto, Wawancara, Kencong 22 Agustus 2017

	2018/2019	Dan perencanaan keuangan madrasah itu difokuskan pada peningkatan pembelajaran siswa secara jujur, bertanggung jawab dan transparan.
2	Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong tahun pelajaran 2018/2019	Madrasah mendapatkan sumber dana dari dua sumber yaitu pemerintah yang berupa BOS dan orang tua siswa yang berupa SPP. Penggunaan dana yang diterima adalah sesuai Standar Nasional Pendidikan pada bidang standar pembiayaan.
3	Evaluasi manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong tahun pelajaran 2018/2019	Evaluasi dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Yang disusun dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban dan yang melakukan adalah kepala madrasah beserta komite madrasah.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data peneliti melalui observasi, interview, dokumentasi dan analisis yang dilakukan, serta berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan, maka dikemukakan berbagai temuan dilapangan.

Dalam penyajian data telah dideskripsikan betapa pentingnya manajemen pembiayaan berbasis sekolah dalam menentukan kemajuan lembaga dan menjadi *out put* yang berkualitas. Maksud dari manajemen

pembiayaan berbasis sekolah tersebut adalah stakeholder dapat bekerja secara maksimal karena dalam pendidikan sekarang ini sekolah mempunyai wewenang untuk mengelola lembaganya sendiri yang artinya pemerintah memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengelola lembaganya sendiri.

Dari penyajian data diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen pembiayaan berbasis sekolah sangat menentukan untuk menentukan hasil yang maksimal dalam pendidikan agar mampu bersaing dalam lembaga pendidikan lainnya.

1. Perencanaan Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma'arif NU Kencong

Perencanaan harus memberikan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi, mengutarakan pendapat, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan informasi. Perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan sasaran, alat, taksiran, tujuan, pedoman, dan kesepakatan yang menghasilkan program-program sekolah. Dan program-program ini sebagai jembatan untuk mencapai tujuan.

Seperti yang ditemukan peneliti bahwasanya manajemen pembiayaan sangatlah penting, karena merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang afektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dan setiap kegiatan yang madrasah mayoritas memerlukan biaya. Selain itu manajemen pembiayaan yang dilaksanakan sekolah bertujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan dana sesuai kebutuhan sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen pembiayaan di setiap lembaga maupun organisasi sangatlah urgen seperti yang ditemukan peneliti bahwa dalam manajemen pembiayaan tidak serta merta membuat perencanaan. Dalam perencanaan ini hal yang pertama dilakukan MA Ma'arif NU Kencong adalah mengidentifikasi kebutuhan dengan menyusun skala prioritas. Dari kegiatan itu maka kebutuhan akan terlihat mana yang membutuhkan pengadaan maupun perbaikan secepatnya dan mana yang masih layak pakai. Dan yang melakukan perencanaan adalah tim para waka, bendahara, kepala madrasah beserta komite madrasah. Dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa sebuah tujuan akan berhasil jika perencanaan dibuat dengan baik. Ungkapan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qu'an dibawah ini.

وَأَكِيدُ كَيْدًا

Artinya: “Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.”
(QS. Ath-Thoriiq: 16).⁷⁷

2. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma'arif NU Kencong

Perencanaan yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, lembaga pendidikan harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan. Hal ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan bisa terealisasi. Dalam manajemen pembiayaan, dana hal yang utama yang harus ada karena pembiayaan atau

⁷⁷ Al-Qur'an, 86:16

keuangan berbicara masalah dana atau uang. Hal yang berkaitan dengan uang yaitu sumber penerimaan karena jika tidak ada sumber dana maka didapat dari mana dana itu. Setelah diketahui sumbernya kemudian dikelola atau digunakan untuk apa saja dana tersebut. Jika kaitannya dalam pendidikan maka sumber pendapatan dan pengeluaran digunakan untuk apa saja dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Seperti yang ditemukan peneliti bahwasanya pelaksanaan manajemen pembiayaan dari sumber keuangan di MA Ma'arif NU Kencong ini berasal dari pemerintah dan orang tua. Hal ini sesuai dengan kajian teori bahwa sumber keuangan sekolah berasal dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Namun di lembaga ini masyarakat tidak ikut memberikan dana mereka hanya memberikan dukungan mengenai kegiatan sekolah. Selain itu bendahara juga membuat pembukuan berupa buku kas. Pembukuan digunakan ketika ada pemasukan dan pengeluaran uang madrasah yang pastinya untuk kegiatan-kegiatan pembenahan maupun kegiatan pengadaan. Adapun dalam penggunaan dana yang diterima madrasah adalah sesuai Standar Nasional Pendidikan pada bidang standar pembiayaan. Jika kegiatan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan maka otomatis meningkatnya mutu pendidikan karena disini pembelajaran akan berlangsung dengan baik, kebutuhan siswa terfasilitasi.

3. Evaluasi Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma'arif NU Kencong

Setiap kegiatan yang sedang maupun yang telah dilakukan memerlukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jika dalam pelaksanaan menyeleweng atau tidak sesuai dari perencanaan yang telah dibuat maka pihak yang bersangkutan akan ditinjau ulang untuk dibenarkan atau diperbaiki.

Seperti yang ditemukan peneliti bahwasanya evaluasi pembiayaan di MA Ma'arif NU Kencong ini menyesuaikan perencanaan dengan anggaran yang ada dan juga membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan kajian teori bahwa dalam evaluasi membutuhkan kesesuaian anggaran serta pertanggungjawaban keuangan. Kesesuaian dalam hal ini sesuai dengan dana penerimaan dengan dana pengeluaran. Maksud ungkapan ini yaitu angka dana pemasukan tidak harus sama persis dengan angka dana pengeluaran melainkan angka dana harus disesuaikan dengan realita kegiatan penerimaan dana yang ada dan begitupun dana pengeluaran harus disesuaikan dengan realita kegiatan pengeluaran dana yang sebenar-benarnya.

Setelah pembukuan penerimaan dana dengan pengeluaran dana sesuai, langkah selanjutnya yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ merupakan laporan yang ditulis pada lembaran kertas yang berisi rekapan hasil dari penerimaan dana dan juga

pengeluarannya dan kurun waktu/periode tertentu. Dan LPJ ini yang membuat adalah bendahara madrasah kemudian dipertanggung jawabkan kepada kepala madrasah dan komite madrasah. Kemudian kepada kepala madrasah dan komite madrasah mempertanggungjawabkan kepada yayasan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan analisis data yang diperoleh tentang manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember tahun pelajaran 2017/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan menganalisis kebutuhan yang nantinya akan dituangkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah dan kemudian dikembangkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu merealisasikan hasil perencanaan yang berisi kegiatan kebhendaharaan diantaranya penyaluran biaya, pembukuan anggaran dan penyusunan laporan.
3. Evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu berupa pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala madrasah komite madrasah, serta yayasan. Kaitannya dalam hal ini yaitu berupa Laporan Pertanggung Jawaban.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang saya lakukan di MA Ma'arif NU Kencong, penulis mengajukan saran-saran sebagai bahan menuju kearah yang lebih baik dan kiranya dapat diambil manfaatnya, diantaranya yaitu:

1. Bagi kepala madrasah

Ciptakan semangat untuk membangun MA Ma'arif NU Kencong lebih maju, meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan out put yang lebih baik, sehingga madrasah akan dipercaya oleh masyarakat dan pendanaanpun akan meningkat.

2. Bagi komite madrasah

Semangat dalam melakukan kerja sama dan memberikan masukan-masukan untuk menggalang dana masyarakat dan DUDI.

3. Bagi tim pembiayaan

Membuat program yang unggul juga dalam impelementasinya untuk meningkatkan mutu madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Ayu Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Arikunto, Suharsimi. 2014 *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Depag RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2009. *Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis*. Jakarta: Depag RI
- Gojali, imam & Umiarso. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: Ircisod.
- Hamidy, Zainuddin dkk. 2009. *Terjemahan hadis shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Pendidikan*. Malang: UIN Maliki Press
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: ALFABETA
- Matry, Nurdin. 2008. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*. Makasar: Aksara Madani
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rema Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- _____. 2014. *Manajemen Berbasis Sekolah konsep, strategi, dan imlementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2013. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press
- Qomar, Mujamil. 2007. *Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sagala, Syaiful. 2013. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Salis, Edward. 2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Sudjana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non Formal Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi Aplikasi*. Surabaya: Kartika
- Sulthon dan Khusnuridlo. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LaksBang PREESindo
- Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar & Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: ALFABETA
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-undang SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional) : UU RI No. 20 Tahun 2003. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifitahus Sholeha
NIM : 084133075
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Kependidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah benar-benar karya asli saya , kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Jember, 13 September 2017

Penulis.



Ifitahus Sholeha
NIM: 084133075

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Manajemen Pembiayaan Berbasis Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018	1. Manajemen Pembiayaan	1. Perencanaan Anggaran	a. Penyusunan anggaran b. Pengembangan anggaran	1. Informan a. Kepala madrasah b. Bendahara madrasah c. Komite madrasah d. 2 wali murid	1. Pendekatan: kualitatif deskriptif 2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Penentuan subyek penelitian: <i>purposive sampling</i> 4. Analisis data: analisis deskriptif 5. Keabsahan data: triangulasi sumber dan teknik	1. Bagaimana perencanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? 2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? 3. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Ma'arif NU Kencong Jember Tahun Pelajaran 2017/2018?
		2. Pelaksanaan Anggaran	a. Penerimaan b. Pengeluaran	2. Kepustakaan 3. Dokumentasi		
		3. Evaluasi	a. Kesesuaian anggaran b. Pertanggung jawaban			
	2. Mutu Pendidikan	1. Akademik	a. Ulangan harian b. Ulangan umum c. Ujian nasional			
		2. Non Akademik	a. Kedisiplinan b. Olahraga c. Kesenian			